

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- HAW. Widjaja. (2004). *Otonomi Desa*. Cetakan. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan. 1. Jakarta: Diadit Media.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Juanda, (2008), "*Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*", Bandung: PT Alumni Bandung.
- Mashuri Mashab, (2013), "*Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*", Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press.
- Nur Basuki Winarno. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media* Jakarta.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechtar. (2017). "*Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*". Surabaya : Airlangga University Press.

### Hasil Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi

- Fauziyah, *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2022.

### Jurnal

- Asmar, Abd Rais, (2019), "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.1.

Dwiyana Achmad Hartanto, (2016), "Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2.

Elvida Br Tarigan, Muhammad Husni Thamrin Nasution, Rosmala Dewi, (2017), "Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa", *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. 6, No. 2.

Evi Nilawat, (2018), "Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 21, No. 1.

Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, Muhammad Fauzan Hidayat, (2022), "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Haryo Pratopo, (2017), "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016", *JOM FISIP* Vol. 4, No. 2.

Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie, (2013), "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

M. Iwan Satriawan, (2013), *Politik Hukum Pemerintahan desa di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2.

Neny Tri Indrianasari, (2017), "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)", *Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*, Vol 1 No. 2.

Pandi Marsidi, (2017), "Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 1.

Raden Handiriono, Desi Hidayati Putri, (2022), "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5.

YogaTejaWiguna, Rosmala Dewi, Nina Angelia, (2017), “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. 6, No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
(Lembaran Negara.2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara 2020/No.245, Tambahan Lembaran Negara No.6573)

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;(Lembaran Negara. 2014 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 5539)

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;( Berita Negara.2016/NO.53)

### **Website:**

<http://banyuputih-batang.desa.id/organisasi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-aset-desa-dengan-inventaris-desa-lt589161fff0560>

[https://www.academia.edu/11080401/Asas\\_Penyelenggaraan\\_Pemerintahan\\_Desa\\_Berdasarkan\\_UU\\_Desa](https://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_Desa)

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/11>